

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, dibutuhkan suatu penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan ini akan terwujud jika di daerah tersebut mempunyai kewenangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu dapat tercapai. Oleh karena itu pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Pemerintah dibedakan dalam dua pengertian yuridis selaku pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu:

1. Selaku alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama Negara yang kekuasaannya melekat pada kedudukan seorang kepala Negara.
2. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintah atau selaku administrator Negara (pejabat atau badan atas usaha Negara).

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945” (Pramudiarta, 2015). Pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut Nurillah (2014) bahwa:

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/

bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Suatu daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain yaitu berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Kepala daerah dalam melaksanakan kekuasaan, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian, maka pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah suatu perwujudan untuk meningkatkan semua aspek dalam urusan pemerintahan melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahannya diserahkan untuk mengatur dan mengurus langsung di daerah itu guna mewujudkan pembangunan daerahnya sehingga menghasilkan pertanggungjawaban dalam bentuk informasi laporan keuangan.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan adalah Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban terhadap kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas.

Menurut Mansur, Prasetyo, Maiyarni (2017) mengemukakan bahwa pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan adalah *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Oleh sebab itu, laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai

pertanggungjawaban (*accountability*) dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu saat tertentu, sedangkan aktivitas operasi dilaporkan untuk suatu periode tertentu.

Menurut Indriasari (2008) bahwa “Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan pokok terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.1.3 Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut Rifandi (2018) bahwa “kebermanfaatan sesuatu hal termasuk informasi merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat dinilai pada sisi kualitatif, yang mana menghubungkan antara keputusan, pemakaian dan keyakinan pengguna informasi itu sendiri.” Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- (a) Relevan;
- (b) Andal;

(c) Dapat dibandingkan; dan

(d) Dapat dipahami.

Para *stakeholder* membutuhkan informasi yang bernilai sesuai dengan keputusan yang ingin dibuat. Inilah alasan agar pemerintah harus mengedepankan manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan supaya informasi dalam laporan keuangan tidak sia-sia.

Menurut Mansur, Prasetyo, Maiyarni (2017) bahwa suatu informasi dikatakan mempunyai nilai apabila sebagai berikut:

Informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa mendatang, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian, dan mengubah keputusan atau perilaku para pemakai.

“Unsur-unsur pembentukan kualitas informasi berupa keterpahaman, keberpautan, nilai prediktif, nilai balikan, ketepatanwaktu, keterandalan, ketepatan penyimbolan, keterujian, kenetralan, keterbandingan, dan materialitas” (Fajrin, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa informasi yang relevan memenuhi karakteristik sebagai berikut:

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

(a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

(b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

(c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

(d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Sedangkan informasi yang andal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, memenuhi karakteristik informasi sebagai berikut:

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Menurut Afrianti (2011) pengertian keandalan dan ketepatanwaktuan adalah sebagai berikut:

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Ketepatanwaktuan merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan dikatakan andal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Transaksi serta peristiwa lainnya disajikan secara wajar dan diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan
2. Informasi yang disajikan oleh OPD tempat anda bekerja bebas dari kesalahan bersifat material
3. Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara jujur dan wajar
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan secara jujur dan wajar
5. Neraca disajikan secara jujur dan wajar
6. Laporan Operasional disajikan secara jujur dan wajar
7. Laporan arus kas disajikan secara jujur dan wajar
8. Laporan Perubahan Ekuitas secara jujur dan wajar
9. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara jujur dan wajar
10. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji

11. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank
12. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu

Sedangkan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikatakan tepat waktu apabila memenuhi kriteria tersedianya informasi serta penyampaian laporan yang teratur dan sistematis sebagai berikut:

1. Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta
2. Berbagai laporan berupa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan disediakan secara sistematis dan teratur
3. Berbagai laporan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan disediakan secara sistematis dan teratur

Salah satu bentuk dari informasi adalah laporan keuangan, di mana pemakainya akan menggunakan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan baik untuk pihak intern maupun pihak ekstern. Oleh sebab itu, agar informasi lebih bernilai maka informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi semua unsur kualitas informasi terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan.

2.1.4 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kendala informasi yang relevan dan andal adalah sebagai berikut:

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

- (a) Materialitas;
- (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan

atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya Dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan oleh individu maupun kelompok dalam melakukan penyelesaian tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi sangat erat hubungannya dengan sistem komputer serta penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu gambaran dari setiap teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. Menurut Indriasari (2008) pengertian teknologi informasi adalah sebagai berikut:

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa:

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari tiga indikator yaitu penggunaan komputer dan jaringan internet, pengolahan data yang terintegrasi, serta pemeliharaan komputer. Menurut Indriasari (2008) bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tepat adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda
3. Jaringan internet dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam melakukan pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
4. Proses akuntansi yang dimulai dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
8. Peralatan yang rusak/usang akan dilakukan perbaikan tepat waktu

2.1.6 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan digunakan untuk mengetahui mengenai perencanaan yang telah disusun apakah berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis atau belum.

Pengawasan pemerintah daerah merupakan rangkaian proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah melalui proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, “Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah adalah pengaturan dan penetapan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pendapatan dan belanja daerah.

Pengawasan keuangan daerah terdiri dari tujuh indikator yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, evaluasi kegiatan, pencatatan transaksi berdasarkan bukti, pencatatan transaksi yang tepat waktu, dokumentasi bukti transaksi, sistem pengawasan pelaksanaan tugas, serta laporan keuangan SKPD

sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut Afrianti (2011), pengawasan keuangan daerah yang baik adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien guna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan setiap triwulan, semester, dan tahunan
3. Setiap kegiatan/transaksi keuangan selalu dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.
4. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar.
5. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan telah diarsipkan/didokumentasikan dengan baik.
6. Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.
7. Laporan keuangan SKPD disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta disusun secara tepat waktu.

2.1.7 Kompetensi Staf Sub Bagian Akuntansi

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan individu, organisasi, maupun sistem untuk melaksanakan fungsinya dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kompetensi tersebut harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Menurut Sitanala (2015) bahwa “Kapasitas sumberdaya (SDM) adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.”

Kemudian menurut Indriasari (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan cara:

Menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Maka dari itu, setiap organisasi juga harus berusaha dalam mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan maupun pengembangan harus dilakukan untuk menjadikan karyawan lebih ahli dalam melaksanakan pekerjaan mereka dengan efektif dan mampu mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang.

Kompetensi staf sub bagian akuntansi terdiri dari 10 indikator yang meliputi SDM yang berkualitas, Latar belakang pendidikan, uraian peran dan fungsi, peran dan tanggung jawab, fungsi akuntansi, pedoman prosedur dan proses akuntansi, pelaksanaan proses akuntansi, sumber daya pendukung operasional, pelatihan keahlian dalam tugas, serta dana-dana dianggarkan. Menurut Ismail (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sub bagian akuntansi/keuangan memiliki staf berkualitas dalam jumlah yang cukup
2. Minimal staf subbagian akuntansi/keuangan merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi
3. Sub bagian akuntansi/keuangan memiliki uraian fungsi dan peran yang jelas
4. Peran serta tanggungjawab semua pegawai sub bagian akuntansi/keuangan ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah
5. Uraian tugas sub bagian akuntansi/keuangan sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi
7. Sub bagian akuntansi/keuangan telah melaksanakan proses akuntansi secara tepat
8. Sub bagian akuntansi/keuangan mempunyai sumber daya pendukung operasional yang cukup
9. Pelatihan-pelatihan dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas
10. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, dan pelatihan yang dibutuhkan

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul/Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel
1	Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir), Indriasari (2008)	<u>Independen:</u> Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Pengendalian Intern Akuntansi (X3) <u>Dependen:</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Meneliti menggunakan variabel yang sama yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan nilai informasi laporan keuangan	Meneliti menggunakan variabel yang berbeda yaitu pengendalian intern akuntansi
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang), Afrianti (2011)	<u>Independen:</u> Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3), Pengawasan Keuangan Daerah (X4), dan PLS (<i>Partial Least</i>	Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia,	Meneliti menggunakan variabel yang sama yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan nilai informasi laporan keuangan	Meneliti menggunakan variabel yang berbeda yaitu sistem pengendalian internal dan PLS

		<p><i>Square</i>) (X5)</p> <p><u>Dependen:</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)</p>	<p>pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.</p>		
3	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman), Fajrin (2014)</p>	<p><u>Independen:</u> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X2)</p> <p><u>Dependen:</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)</p>	<p>sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah</p>	<p>Meneliti menggunakan variabel yang sama yaitu pengawasan keuangan daerah dan nilai informasi laporan keuangan</p>	<p>Meneliti menggunakan variabel yang berbeda yaitu sistem pengendalian internal</p>
4	<p>Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI,</p>	<p><u>Independen:</u> Kualitas</p>	<p>Kualitas sumber daya manusia,</p>	<p>Meneliti menggunakan</p>	<p>Meneliti menggunakan</p>

	dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Roshanti, Sujana, Sinarwati (2014)	Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) <u>Dependen:</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah	variabel yang sama yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan nilai informasi laporan keuangan	variabel yang berbeda yaitu sistem pengendalian internal
5	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Merauke, Wati, Nahumury (2014)	<u>Independen:</u> Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) <u>Dependen:</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten Merauke	Meneliti menggunakan variabel yang sama yaitu kualitas sumber daya manusia dan nilai informasi laporan keuangan	-
6	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai Skpd Di Kabupaten Batang Dan Kabupaten Kendal), Pramudiarta (2015)	<u>Independen :</u> Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) <u>Dependen :</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	Kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap	Meneliti menggunakan variabel yang sama yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan nilai informasi laporan keuangan	Meneliti menggunakan variabel yang berbeda yaitu sistem pengendalian internal

			nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.		
7	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman), Jadidah (2016)	<p><u>Independen:</u> Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Pengendalian Intern Akuntansi (X3), dan Pengawasan Keuangan Daerah (X4)</p> <p><u>Dependen:</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)</p>	Kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Meneliti menggunakan variabel yang sama yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan nilai informasi laporan keuangan	Meneliti menggunakan variabel yang berbeda yaitu pengendalian intern akuntansi
8	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mansur, Prasetyo, Maiyarni, (2017)	<p><u>Independen:</u> Pengawasan Keuangan Daerah (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Teknologi Informasi (X3), dan Sistem Pengendalian Intern (X4)</p> <p><u>Dependen:</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)</p>	Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh	Meneliti menggunakan variabel yang sama yaitu pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan nilai informasi laporan keuangan	Meneliti menggunakan variabel yang berbeda yaitu sistem pengendalian internal

			Pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah		
9	Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rifandi (2018)	<u>Independen:</u> Teknologi Informasi (X1) dan Pengawasan Keuangan (X2) <u>Dependen:</u> Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah	Meneliti menggunakan variabel yang sama yaitu teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan nilai informasi laporan keuangan	-

Sumber: Beberapa referensi terkait (2008-2018)

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

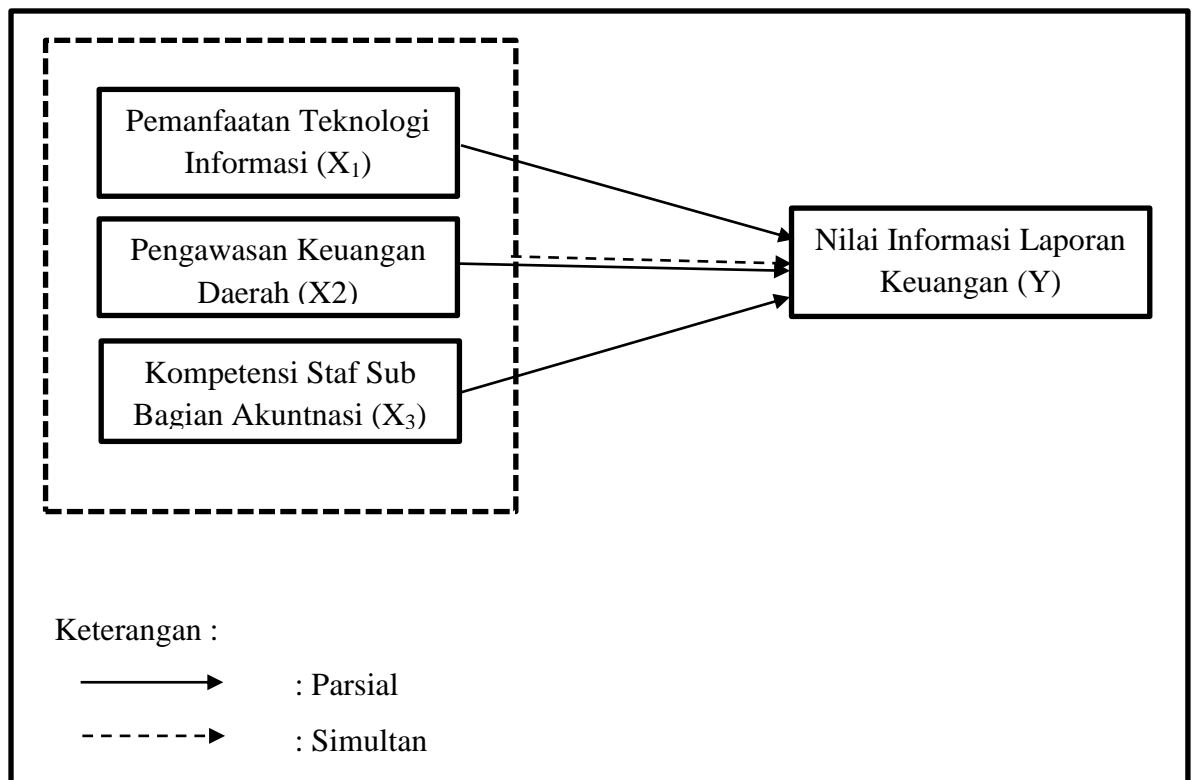
Menurut Afrianti (2011), “Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan.” Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai).

Berbagai penelitian mengenai nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya dan menghasilkan berbagai temuan yang berbeda mengenai faktor-faktor yang membentuk serta mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan secara umum, bahwa untuk menghasilkan informasi laporan keuangan pemerintah

daerah yang bernilai, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikembangkan suatu kerangka pemikiran atas penelitian ini, yaitu :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawabannya yang diberikan baru berdasarkan teori. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, serta berdasarkan uraian mengenai hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi staf sub bagian akuntansi terhadap

nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₂: Diduga pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₃: Diduga kompetensi staf sub bagian akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₄: Diduga pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan kompetensi staf sub bagian akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.